

**PENGARUH GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH (GGBS) DAN  
ISLAMICITY FINANCIAL PERFORMANCE INDEX TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH  
DI INDONESIA TAHUN 2014 – 2018**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**oleh :**

**NITA NUR FADILLAH**

**NPM : 1651020441**

**JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441H / 2020**

**PENGARUH GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH (GGBS) DAN  
ISLAMICITY FINANCIAL PERFORMANCE INDEX TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH  
DI INDONESIA TAHUN 2014 – 2018**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh :**

**NITA NUR FADILLAH  
NPM : 1651020441**

**JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH**

**Pembimbing I : A. Zulianzsyah, S.Si.,M.M**

**Pembimbing II : Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak., Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H / 2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebelum penulis menguraikan latar belakang masalah dalam skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam penulisan ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) Dan Islamicity Financial Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014 – 2018” yang akan diuraikan istilah – istilah diatas sebagai berikut.

1. Pengaruh merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang dipengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>1</sup>
2. Good Corporate Governance menurut IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*), adalah struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder*

---

<sup>1</sup> Departemen pendidikan nasional, “Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa”, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1045

lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.<sup>2</sup>

3. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.<sup>3</sup>
4. Islamicity Financial Performance Index adalah salah satu pengukuran kinerja keuangan yang ada di bank syariah yang terdiri dari tujuh rasio yang merupakan cerminan dari kinerja bank syariah.<sup>4</sup>
5. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian beberapa pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa maksud dalam judul penelitian ini adalah Pengaruh Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) Dan Islamicity Financial Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014 – 2018.

---

<sup>2</sup> Adrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (implementasi teori dan praktik)*, (Pasuruan : Qiara Media Partner), h.417

<sup>3</sup> Irham fahmi, *manajemen Kinerja teori dan aplikasi*, (Bandung : ALFABETA,2011) h.142

<sup>4</sup> Sayekti Endah Retno Meilani, *Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah Di Indonesia*, seminar nasional the 2nd call for syariah paper tahun 2015 h. 187

<sup>5</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, h. 3s

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut

### 1. Alasan Objektif

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan telah melikuidasi enam bank sejak awal tahun 2019, diantara bank yang di nyatakan likuid adalah BPRS Jabal Tsur di Pasuruan, BPRS Safir di Bengkulu, BPR Paca Dana di Batu Malang, BPRS Muamalat Youtefa di Papua, BPR Legian di Denpasar, dan BPR Efitra Dana Sejahtera di Depok. Hal ini disebabkan oleh tatakelola perusahaan yang lemah atau *good corporate governance* yang tidak dilakukan pihak manajemen. Lemahnya tata kelola perbankan syariah menyebabkan pihak manajemen melakukan kecurangan saat penyusunan laporan keuangan, misalnya kredit yang sebenarnya macet di sajikan lancar dan struktur keuangan yang tidak baik tetapi disajikan sedang mengalami pertumbuhan.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan bank syariah dalam menjalankan prinsip – prinsip syariah.

Bank Umum Syariah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat diantara semakin bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah yang ada di indonesia, hal ini menjadi dorongan agar setiap bank syariah mempertahankan eksistensinya serta meningkatkan kualitas bank tersebut agar mampu bertahan dalam

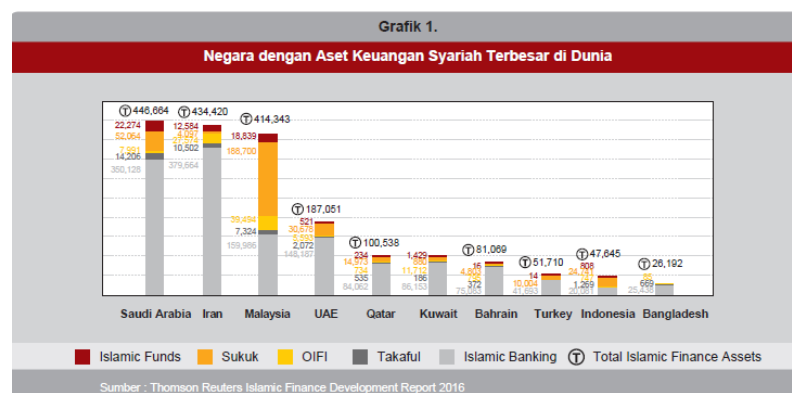
---

<sup>6</sup> Johana Artha Uly, *LPS Beberkan Risiko yang Dapat Memperketat Likuiditas Perbankan*, Ekozone.com, 20 Januari 2020, 21:22 WIB.

persaingan yaitu pertama, dengan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang di dalam nya sudah terdapat prinsip – prinsip syariah seperti keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Kedua, dengan meningkatkan kinerja keuangan dari perusahaan tersebut dalam hal ini menggunakan *islamicity financial performance index* yang di dalamnya tidak hanya menampilkan dari sisi finansial nya saja tetapi juga dari sisi syariah nya.

Dalam *Islamic Financial Report for Indonesia* bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam perkembangan industri perbankan syariah karena penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam yang akan menjadi pelaku dalam kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Bahkan dalam pasar global indonesia masuk ke dalam sepuluh besar dengan aset keuangan syariah terbesar di dunia.<sup>7</sup>

**Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Keuangan Syariah**



Sumber :Rodmap Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2017-2019

<sup>7</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) Rodmap Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2017-2019

## 2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini merupakan penelitian anjuta untuk memberikan data terbaru dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Itan Lampung.
- b. Mengingat masalah yang di bahas dalam skripsi ini sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu jurusan yang masih berkaitan dengan kegiatan Perbankan, serta didukung oleh tersedianya literatur baik primer maupun skunder dan data penelitian lapangan yang menunjang dalam penelitian tersebut.

## C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, potensi yang mulai diperhatikan oleh dunia internasional. Bank dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen pada 2019 kemudian naik menjadi 5,2 persen pada tahun 2020. Proyeksi ini didukung oleh konsumsi masyarakat, yang akan diperkirakan akan terus meningkat karena inflasi tetap rendah dan pasar tenaga kerja yang kuat. Salah satu yang menjadi faktor peningkatan ekonomi di Indonesia adalah dari perbankan.<sup>8</sup>

Perkembangan awal perbankan syariah di Indonesia direspon dengan sangat baik oleh pemerintah yaitu pada tanggal 25 Maret 1992

---

<sup>8</sup> Ilyas Istianur Praditya, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019 Mentok di 5,3 Persen*, Liputan6.com, 08 juli 2019, 20:15 WIB

disahkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selanjutnya pada tahun 1998 lahirlah Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang semakin menguatkan regulasi Perbankan di Indonesia. Pada pasal 1 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum atau Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.<sup>9</sup>

Pada tahun 1998 terjadi krisis di Indonesia yang menjadi kehancuran bagi sistem perbankan di Indonesia, tetapi pada saat itu juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan bank syariah tidak terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut. Tetapi bank – bank konvensional baik milik pemerintah maupun swasta terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut. Oleh karena fenomena tersebut beberapa bank konvensional baik milik swasta maupun pemerintah, mengembangkan usahanya dengan mendirikan Bank Syariah diantaranya, Bank Syariah Mandiri yang didirikan tahun 1999, Bank Permata Syariah yang didirikan pada tahun 2002, Bank Mega syariah berdiri tahun 2004, Bank Rakyat Indonesia Syariah berdiri tahun 2008, Bank Syariah Bukopin berdiri tahun 2008, dan lain – lain. Dengan merespon perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat pada

---

<sup>9</sup> Andrew Shandy Utama, *Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 2, No. 2, September 2018, h.193



tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>10</sup>

Perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Direktur utama BNI syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan dalam kurun waktu 2014 – 2018, perbankan syariah mampu mencatat Compounded Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 15% lebih tinggi dari industri perbankan nasional yang mencatat CAGR sebesar 10%.<sup>11</sup>

Semakin banyak nya jumlah bank syariah yang beroperasi di indonesia, baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan berbagai bentuk produk dan pelayanan yang diberikan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan yang paling penting adalah bagaimana kualitas kinerja bank syariah yang ada. Bank syariah haruslah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan peran dan tanggung jawab bank syariah selaku lembaga keuangan islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, tetapi yang paling penting adalah kepastian seluruh kegiatan yang di jalankan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Andrew Shandy Utama, *ibid.*, h. 195

<sup>11</sup> Rahajeng Kusumo Hastuti, *5 Tahun Rerata Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah 15%*, CNBC Indonesia Syariah, 08 juni 2019, 18:37

<sup>12</sup> Hameed , *et al.*, “*Alternative Discosure and Performance Measure for islamic bank*”, tahun 2004, h. 2

**Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah**  
**Tahun                      2014      2015      2016      2017      2018**

Bank Umum Syariah					
- Jumlah Bank	12	12	13	13	14
- Jumlah Kantor	2.163	1.990	1.869	1.825	1.875
Unit Usaha Syariah					
- Jumlah Bank Umum Kovenasional Yang Memiliki UUS	22	22	21	21	20
- Jumlah Kantor	320	325	332	344	354
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
- Jumlah Bank	163	162	166	167	167
- Jumlah Kantor	439	433	453	441	495
Total Kantor	2.922	2.748	2.654	2.610	2.724

*Data diolah tahun 2020*

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dilihat dari jumlah aset yang dimiliki pada akhir tahun 2014 total aset Bank Umum Syariah mencapai Rp204.961 Milyar Rupiah dan mengalami peningkatan pada akhir tahun 2018 menjadi Rp361.691 Milyar Rupiah. Sedangkan total aset yang dimiliki Unit Usaha Syariah pada akhir tahun 2014 mencapai Rp67.383 Milyar Rupiah dan mengalami peningkatan pada akhir tahun 2018 menjadi Rp160.636 Milyar Rupiah. Sedangkan *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah tahun 2014 adalah 0,41% mengalami peningkatan sebesar 0,87% yaitu menjadi 1,28% di tahun 2018.<sup>13</sup>

Bank Indonesia menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik dan kinerja perbankan syariah yang sehat dan tangguh secara finansial serta senantiasa mengacu pada prinsip – prinsip syariah serta melindungi

---

<sup>13</sup> <https://www.ojk.go.id> (Data Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2014 – 2018)

kepentingan *stakeholder*, maka bank syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional, kewajaran dan harus memenuhi prinsip syariah (*syaria compliace*).<sup>14</sup> Permasalahan governance dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan Bank Konvensional. Bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip – prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam menjalankan bisnisnya.<sup>15</sup> Bank Indonesia menyadari dari pelaksanaan GCG untuk bank syariah tidak dapat hanya berdasarkan pada prinsip – prinsip GCG namun juga harus berpedoman pada ketentuan – ketentuan syariah. Untuk itu Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 mengenai *Good corporate Governance* untuk Bisnis Syariah (GGBS) dan SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.<sup>16</sup>

Good Governance Business Syariah (GGBS) adalah salah satu elemen penting dalam mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan usaha. Dan di bank syariah merupakan suatu cara untuk meningkatkan dinamika ekonomi dan karenanya meningkatkan kinerja ekonomi syariah secara

---

<sup>14</sup> Ayu Widiastuti, Mulyaning Wulan, “*Good Governance Bisnis Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah*”, jurnal ekonomi dan bisnois Vol.1, NO.1, Maret 2017, h. 95

<sup>15</sup> B Sukardi, *Corporate Governance Engineering of Islamic Banking and Finance : Tantangan Globalisasi Sistem Ekonomi dan Pasar Bebas*. Vol. 9 No. 1, April 2013, Jurnal Unida, h. 154

<sup>16</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tanggal 7 Desember tentang GCG bagi Bank Syariah)

keseluruhan. Bisnis yang di jalankan dengan Governance yang baik akan cenderung lebih bertahan secara berkelanjutan dan dapat berlangsung dengan baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), kemampuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis sangat penting untuk mendapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Penerapan GGBS oleh Bank Syariah di Indonsia dapat digambarkan melalui pencapaian Indeks Penerapan GGBS.<sup>17</sup>

Dalam konteks penerapan *Good Corporate Governance* di bank syariah, para bankir syariah harus benar – benar kepada prinsip – prinsip dan nilai – nilai ekonomi dan bisnis islam yang telah di terapkan oleh Rasulullah. Kalau tidak, jangan menjadi praktisi bankir syariah, karena dapat dikhawatirkan dapat merusak citra “kesucian” syariah dimasa yang akan datang.

Jika dibandingkan dengan para bankir konvensional, seharusnya para bankir syariah lebih unggul dan terdepan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* di lembaga perbankan, karena perbankan syariah membawa nama kedalam lembaga bisnis. Tegasnya, bankir syariah mampu memainkan perannya sebagai penegak *Good Corporate Governance* di lembaga perbankan. Jika para bankir syariah melakukan penyimpangan, bukan hanya berimplementasi pada lembaga tersebut, tetapi juga berpengaruh pada citra syariah. Meskipun masyarakat mengetahui kesalahan itu dilakukan oleh oknum

---

<sup>17</sup> Sayekti Endah Retno Meilani, *loc.cit.*, h.183

tertentu, tetap saja orang akan dengan cepat menilai bahwa lembaga syariah saja melakukan penyimpangan, apalagi lembaga konvensional.<sup>18</sup>

Penilaian *Good Corporate Governance* menggunakan *Checklist (self assesment)* dimana hasil penilaiannya dalam bentuk indeks. Untuk keperluan internal, penilaian dilakukan secara semesteran dan untuk keperluan laporan kepada Bank Indonesia, penilaian dilakukan secara tahunan. Seiring dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian atas pelaksanaan GCG bagi BUS, dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor. Menyusun analisis *self assesment*, dengan cara membandingkan pemenuhan setiap kriteria/Indikator dengan kondisi bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan analisis tersebut ditetapkan peringkat masing – masing kriteria/indikator.<sup>19</sup>

Pelaksanaan *Good Governance Business Syariah (GGBS)* yang sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai pasar perusahaan pengukuran kinerja lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip – prinsip syariah, tentunya berbeda dengan perusahaan lain terutama dari sisi orientasi. Sebagai suatu lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip – prinsip syariah, bank syariah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda

---

<sup>18</sup> Farhah, *Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance di Bank Syariah Mandiri*, (skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014 ), h. 5

<sup>19</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, h. 19 – 21

dari perusahaan lain dalam orientasi kinerjanya. Hameed et al. menyajikan sebuah alternatif pengukuran kinerja untuk *Islamic Bank*, melalui sebuah indeks yang dinamakan *Islamicity Indices*, yang terdiri dari *Islamicity Discloruse Indeks* dan *Islamicity Performace Indeks*. Indeks ini bertujuan membantu para *Stakeholder* dalam menilai kinerja bank syariah. Indeks inilah yang selanjutnya digunakan dalam menilai kinerja institusi keuangan syariah.<sup>20</sup>

Penilaian kinerja di bank syariah bisa dilihat dari beberapa indikator – indikator penilaian kesehatan bank syariah, sedangkan untuk penilaian kinerja sosial perlu di kembangkan sebuah model penelitian yang dikembangkan dari penelitian – penelitian terdahulu sehingga dapat memenuhi kepentingan dan harapan bagi pihak yang membutuhkan.<sup>21</sup> Pengukuran tingkat kesahatan menggunakan analisis CAMELS yang mencakup faktor – faktor *capital* (permodalan), *asset* (kualitas aset), *management* (manajemen), *earnings* (Rentabilitas), *liquidity* (likuiditas, *sensitivity to market risk* (penilaian terhadap resiko pasar) masih memiliki kekurangan yaitu analisis kesehatannya tidak memberikan kesimpulan yang mengarah pada satu penilaian yang membuat penilaian kesehatan kurang efisien. Sedangkan apabila menggunakan metode RGEC yang mencakup faktor – faktor profil resiko (*Risk Profile*), *Good Corporate*

---

<sup>20</sup> Harianto, Nanda Dan Syafruddin, Muchamad, “Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Bisnis Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia”, Diponegoro Jurnal Of Accounting, Volume 2 Nomor 4. Tahun 2013, h. 1

<sup>21</sup> Prasetyo Adi Sulistyo, et. al., “Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan *Islamicity Performance Index* Studi Pada BMI dan BSM”, (Forum Riset Keuangan Syariah I, 2002), h. 3.

*Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earning*), dan permodalan (*Capital*), menekankan pada kualitas manajemen.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas pengukuran kinerja menggunakan analisis CAMELS dan RGEC tidak mampu mengungkapkan fungsi sosial suatu bank. Penukuran kinerja saat ini hanya menampilkan *Performance financing* saja, sehingga dibutuhkan penelitian kinerja yang mampu mengungkapkan nilai – nilai sosial suatu bank syariah. Oleh karena itu berdasarkan penilitain oleh Hameed yang berhasil menemukan alat ukur baru untuk mengukur kinerja bank syariah yang tidak hanya menampilkan *performance financing* saja tetapi juga mengungkapkan nilai – nilai sosial bank syariah yang disebut *Islamicity Performance Index*. Yang terdapat tujuh rasio yang diukur yaitu, *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors – employees welfare ratio*, *islamic income vs non islamic income*, *islamic investmen vs non islamic invesment*, dan *AAOFI Index*.<sup>23</sup>

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh *Good Governance Bisnis Syariah* dan *Islamicity Financial Perforamace indeks* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Peneliti menggunakan sampel bank bank syariah yang sudah berstatus Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Mengacu pada penelitaian Hamed *et al.* (2004) untuk mengukur *Islamicity Fiancial Performance Indeks* yang terdiri atas 4 rasio diantaranya : *profit sharing*

---

<sup>22</sup> Bayu Aji Permata, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode CAMELS dan Metode RGEC”, Jurnal Akuntansi UNESA vo., 1, No.1, 2012, h. 20.

<sup>23</sup> Hameed , *et al.*, *Loc. It.*,

*ratio*, *zakat performance rati*, *equitable distribution ratio* dan *islamic income vs non islamic income*. Sedangkan pengukuran *Good Governance Bisnis Syariah* diukur menggunakan analisi *self assessment* yang terdiri dari 11 indikator. Pengukuran Kinerja Keuangan menggunakan rasio profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA). Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Good Governance Bisnis Syariah* (GGBS) Dan *Islamicity Financial Performance Index* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014 – 2018”**.

#### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah digunakan untuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian serta menghindari kesimpangsiuran dalam membahas dan menganalisis pengaruh *Good Governance Bisnis Syariah* dan *Islamicity Performance Indeks* terhadap kinerja keuangan. Pengukuran *Good Governance Bisnis Syariah* menggunakan analisis *Self assessment* yang terdiri dari 11 indikator, sedangkan pengukuran kinerja keuangan menggunakan *Performance Indeks* yang terdiri atas : , *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors – employees welfare ratio*, *islamic income vs non islamic income*, *islamic investmen vs non islamic invesment*, dan *AAOFI Index*.

Fokus penelitain ini hanya pada *financing performance* dan *social performance*, yaitu hanya ada empat rasio yang diambil yang terdiri dari :



*profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio* dan *islamic income vs non islamic income*. Sementara index AAOFI adalah index untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga bank syariah mematuhi prinsip – prinsip yang di terapkan oleh AAOFI mengenai proses *accounting dan Auditing*. Peneliti juga tidak menggunakan index *directors – employees welfare ratio* yang mengukur tingkat perbandingan gaji direktur dan karyawan, karena keterbatasan data oleh peneliti.

Bank Umum Syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank yang memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti, yaitu telah beroperasi sesuai dengan periode penelitian, tidak mengalami perubahan bentuk badan usaha selama periode penelitian, memiliki data yang lengkap sesuai kebutuhan penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut maka terdapat 9 Bank Umum Syariah yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan laporan tahunan sebagai sumber data, sedangkan periode penelitian ini hanya di batasi pada periode waktu tahun 2014 – 2018.

#### **E. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan , maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Good Governance Bisnis Syariah* menggunakan analisis *Self assessment* terhadap kinerja keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

2. Bagaimana pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah ?
4. Bagaimana pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah ?
5. Bagaimana pengaruh *Islamic Income Vs Non Islamic Income* terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Good Governance Bisnis Syariah* menggunakan analisis *Self assessment* terhadap kinerja keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Zakat Performance Ratio* terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Islamic Income Vs Non Islamic Income* terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah.

## **G. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh *Good Governance Bisnis Syariah* dan *Islamicity Financial Performance Indeks* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia serta sebagai wahana tambahan referensi serta bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi penulis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh *Good Governance Bisnis Syariah* dan *Islamicity Performance Indeks* terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah.

#### **2. Bagi Lembaga Pendidikan**

Penelitian ini menambah referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai data dan informasi untuk kegiatan belajar. Selain itu, sebagai karya akademis, penelitian ini

juga menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga pendidikan dalam memberikan pendidikan kepada mahasiswa.

### **3. Bagi Masyarakat**

Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penerapan GGBS dan *Islamicity Financial Performance Indeks* terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah.

### **4. Bagi Perbankan Syariah**

Bagi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan acuan untuk meningkatkan kegiatan di perbankan syariah di Indonesia.

### **5. Bagi pemberi kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pihak yang berwewenang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Good Governance Bisnis Syariah

##### 1. Teori Stakeholder

Teori ini pada awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki *stakeholder*, yaitu pihak-pihak berkepentingan dengan perusahaan. Ide bahwa perusahaan memiliki *stakeholder* ini kemudian menjadi hal yang banyak dibicarakan dalam literatur – literatur manajemen baik akademis maupun profesional. Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai stakeholder adalah *Strategic Management : A Stakeholder Approach* Oleh Freeman pada tahun 1984. Sejak saat itu banyak sekali study yang membahas mengenai konsep stakeholder. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970, secara umum dikenal dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk kontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. *Stakeholder theory* dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sayekti Endah Retno Meilani, *op.cit.*, h. 184

Stakeholder menurut Freeman dan McVea adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Stakeholder dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu stakeholder primer dan stakeholder skunder. Stakeholder primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi : shareholder dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok stakeholder publik, yaitu : pemerintah dan komunitas. Kelompok stakeholder sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya. Dari dua jenis stakeholder diatas, stakeholder primer adalah stakeholder yang paling berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan karena mempunyai power dengan cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya perusahaan.<sup>25</sup>

Dalam teori stakeholder posisi para stakeholder dipertimbangkan sebagai pihak yang paling memiliki kekuatan dalam perusahaan, sehingga pertimbangan utama bagi perusahaan dalam memutuskan untuk mengungkap atau tidak suatu informasi dalam laporan keuangan adalah stakeholder. Teori stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana.

---

<sup>25</sup> *Loc.cit.*, h. 184

Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan diatas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspetasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder. Stakeholder memiliki hak untuk diberi informasi bagaimana dampak aktivitas perusahaan bagi mereka meskipun akhirnya mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut, atau tidak dapat memainkan peran konstruktif di dalam kelangsungan hidup perusahaan.<sup>26</sup>

Berdasarkan teori di atas suatu perbankan terdapat tata kelola perusahaan yang tertuang dalam good corporate governance, di dalam GCG ini terdapat beberpa pemegang kepentingan yaitu dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah dimana mereka membutuhkan laporan dari kinerja perusahaan tersebut untuk mengetahui apakah kinerja dari perusahaan tersebut baik atau tidak sehingga dapat diputuskan untuk perubahan kedepannya.

## **2. Good Governance Bisnis Syariah**

### **a. Pengertian**

Istilah “*corporate governance*” pertama kali diperkenalkan oleh *cadbury commite* pada tahun 1992 dalam laporan yang dikenal dengan *cadbury report*. Laporan ini menandakan pula sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik *corporate*

---

<sup>26</sup> *Loc.cit.*, h. 184

*governance* diseluruh dunia. Dalam *cadbury report* yang dimaksud dengan *corporate governance* adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.<sup>27</sup>

Di Indonesia, konsep *good corporate governance* mulai diperkenalkan pada tahun 1999 setelah perintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG mengeluarkan pedoman umum *Good Corporate Governance* pada tahun 2000 yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Isi dari pedoman tersebut adalah setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan *good corporate governance* dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh KNKG dalam laporan tahunannya. Hal ini berarti setiap perusahaan telah menerapkan prinsip *good corporate governance* tidak terkecuali perusahaan perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sudarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)* (Bandung : CV. Mandar Maju, Bag.3, 2007) h.53

<sup>28</sup> Devi Septiana, *Analisi Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung, 2018), h.27



Konsep *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh IFSB (*Islamic Financial Service Board*) yang sering disebut dengan *Syariah Governance* sebagian besar memiliki prinsip – prinsip yang sama dengan *Good Corporate Governance* konvensional. Perbedaan yang ada dalam *Good Corporate Governance* syariah dan konvensional hanya terletak pada syariah compliance yaitu kepatuhan kepada syariah. Sedangkan prinsip – prinsip transparansi, kejujuran, kehati – hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan *Good Corporate Governance* konvensional.<sup>29</sup>

*Islamic Financial Service Board* (IFBS) menjelaskan tentang definisi *sharia Governance* sebagai berikut :<sup>30</sup>

Sistem *Syariah Governance* merupakan seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internal perusahaan syariah.

*Good Corporate Governance* dalam pandangan syariah sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi dengan efisien,

---

<sup>29</sup> Siti Maria Wardani, “Implementasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah”. (Jurnal Universitas Jember, Walisongo, Vol. 19, No. 1, Mei 2011), h. 4

<sup>30</sup> Islamic Financial Service Board, “Guiding Principles on Shari’ah Governance System for Institution Islamic Financial Service”, Desember 2009, h. 1

efektif ekonomis maupun produktif dengan prinsip – prinsip terbuka akuntabilitas pertanggungjawaban, independen dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.<sup>31</sup>

Hal Ini dijelaskan pula dalam Al – Qur’an surat An – Nahl ayat 90 yang artinya :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*<sup>32</sup>

Dari beberapa pendapat para ilmuan di atas kesimpulannya adalah *Good Corporate Governance* suatu mekanisme dan struktur serta aturan yang sesuai dalam syariah dimana sikap transparansi, adil serta bertanggungjawab ialah hal yang memang sudah diterapkan oleh Islam dalam berbisnis, hal ini pula harus ditepakan oleh setiap pemimpin yang memimpin anggota atau karyawan agar terciptanya kemaslahatan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Ar – Ruzz Media, Yogyakarta, 2010, h. 42

<sup>32</sup> QS. An – Nahl (16) : 90

<sup>33</sup> Jeli Makrifat, *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas (studi pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2013-2017)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung, 2019) h.17

## **b. Prinsip Dasar *Good Corporate Governance***

Konsep *Corporate Governance* mulai berkembang sejak tahun 1990-an di Asia. Sedangkan di Inggris, konsep ini baru dikenal pada tahun 1992. Negara – negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok negara – negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikan pada tahun 1999. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menawarkan prinsip – prinsip yang menjadi indikator utama dari *good corporate governance*. Prinsip – prinsip tersebut antara lain : *Fairness*, *Transparency*, *Accountability*, dan *Responsibility*. Keempat prinsip tersebut penting karena penerapan prinsip *corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama yang berkaitan dengan manajemen laba perusahaan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.<sup>34</sup>

### **1) *Fairness* (keadilan)**

Prinsip keadilan merupakan kesetaraan yang harus menjamin adanya perlakuan adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

---

<sup>34</sup> Thomas S. Khaihatu, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*”, (Surabaya : Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8 No.1 : 1-9,2006), h. 2

Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham yang hanya memiliki sejumlah kecil saham di dalam perusahaan (pemegang saham minoritas) dan pemegang saham asing yang secara otomatis memiliki akses dan kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok yang mayoritas. Dengan perlakuan yang adil tersebut, diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis.<sup>35</sup>

Prinsip keadilan ini tentunya sesuai dengan ajaran syariat islam yang terdapat dalam QS. Ar – Rahman ayat 7-9 :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

*“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”<sup>36</sup>*

## 2) **Disclosure Transparency (Transparansi)**

Keputusan Menteri Negara BUMN tahun 2002 mengartikan transparansi merupakan keterbukaan dan mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Jadi dalam prinsip ini, para pemegang saham haruslah diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas perubahan –

---

<sup>35</sup> Devi Septiana, *op.cit.*, h. 34

<sup>36</sup> QS. Ar – Rahman (55) : 7-9.

perubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai perusahaan. Prinsip transparansi atau keterbukaan sesungguhnya telah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabda Beliau yang berbunyi :

*“Janganlah kamu memperhatikan banyaknya shalat dan puasanya, jangan pula kamu memperhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujuran dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat.”*

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa jika ingin menilai seseorang maka harus memperhatikan kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat, tentu ini sangat sesuai dengan prinsip *transparency* yang berarti keterbukaan.<sup>37</sup>

### 3) *Accountability* (Akuntabilitas)

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksanan secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat *job description* yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi – fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap

---

<sup>37</sup> Devi Septiana, *op.cit.*, h.35-36

kebijakan perusahaan. *Corporate Governance* harus menjamin perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan asing serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.<sup>38</sup>

Prinsip akuntabilitas sesungguhnya telah tercantum di dalam Al – Qur'an, yaitu terdapat dalam surat Al – Baqarah 282 yang artinya :

*“Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya....(QS. Al – Baqarah : 282)*

Jika *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris serta direksi. Dengan adanya kejelasan maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ahmad Dariri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapan dalam Konteks Indonesia*, Jakarta : Ray Indonesia, 2005, h. 10

<sup>39</sup> *Loc.it*

#### 4) *Responsibility* (Responsibilitas)

*Organization for Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam *corporate governance* dapat direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasi kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya.<sup>40</sup>

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP 117/M-MBU/2002 bahwa disamping keempat prinsip diatas, masih ada satu prinsip tambahan lagi, yaitu prinsip kemandirian (*independence*). Prinsip ini diartikan sebagai suatu dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Devi Septiana, *op.cit.*, h. 37

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 39

### c. **Penilaian *Good Corporate Governance***

Dalam Penilaian ini peneliti menilai *Good Corporate Governance* menggunakan *Checklist (self assesment)* dimana hasil penilaiannya dalam bentuk indeks. Untuk keperluan internal, penilaian dilakukan secara semesteran dan untuk keperluan laporan kepada Bank Indonesia, penilaian dilakukan secara tahunan. Seiring dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian atas pelaksanaan GCG bagi BUS, dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- 5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- 6) Penanganan benturan kepentingan
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan
- 8) Penerapan fungsi audit intern
- 9) Penerapan fungsi audit ekstern



10) Batas Maksimum Penyaluran dana; dan

11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS ,  
laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.<sup>42</sup>

Penerapan predikat faktor Good Governance pada Bank Umum syariah dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni sebagai berikut :<sup>43</sup>

**Tabel 2.2 Predikat dan Skala Interval atas Peringkat Self  
Assessment GGBS**

No.	Nilai Komposit	Predikat Komposit
1	Nilai Komposit <1,5	Sangat Baik
2	1,5<= Nilai Komposit <2,5	Baik
3	2,5<= Nilai Komposit <3,5	Cukup Baik
4	3,5<= Nilai Komposit <4,5	Kurang Baik
5	4,5<= Nilai Komposit <=5	Tidak Baik

*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020*

Terdapat beberapa perbedaan antara GCG dengan GGBS.

Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : <sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

<sup>43</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

<sup>44</sup> Jumansyah dan Syafei, 2013, *Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Prananta Sosial*, Vol. 2, No. 1

**Tabel 2.3 Perbedaan GCG dengan GCG Bisnis Syariah**

<b>Aspek/Kriteria</b>	<b>Pedoman GCG</b>	<b>Pedoman GCG Bisnis Syariah</b>
Penciptaan prakondisi/situasi yang kondusif	Terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan UU yang didukung oleh 3 pilar : Negara, dunia usaha dan masyarakat	Terwujudnya bisnis yang berlandaskan pada kaidah – kaidah Syariah dan berorientasi pada keberhasilan materi dan spiritual. Prakondisi spiritual untuk mewujudkan ketaqwaan. Prakondisi operasional yang didukung oleh 4 pilar : Negara, Ulama, Dunia Usaha dan Masyarakat.
Asas <i>Good Governance</i>	Transparansi, Kuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran serta kesetaraan.	Dua pijakan dasar, yaitu : Spiritual yang berupa halal dan tayib. Operasional yaitu prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran dan kesetaraan yang berlandaskan Qur'an dan Hadist.
Etika dan Pedoman Prilaku	Setiap perusahaan harus <i>core value</i> : seperti terpercaya, adil, jujur yang	Etika bisnis merupakan acuan moral demi terbentuknya

menggambarkan sikap moral dan etika bisnis setiap organisasi perusahaan dan karyawan. akhlaqul karimah dalam berbisnis. Bisnis Syariah harus mengacu pada prinsip dasar, jujur adil amanah dan ahsan. Pelaku bisnis dapat merumuskan pedoman perilaku yang terdiri dari nilai – nilai bisnis, etika bisnis, dan pedoman perilaku Bisnis Syariah.

## **B. Islamicity Financial Performance Indeks**

### **1. Teori Signaling**

*Signaling theory* atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977, yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya meningkat. Hal positif dalam *theory signaling* dimana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki berita bagus, dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan mereka, sinyal tentang bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus tidak akan dipercaya oleh pasar.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Lukas setia atmaja, *Teori Dan Praktek Manajemen Keuangan* ,( Yogyakarta :ANDI, 2008), h. 14

Teori sinyal (*signaling theory*) merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Secara umum sinyal dapat diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan kepada investor. Sinyal tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk, baik yang langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaah lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Sinyal yang disampaikan melalui aksi korporasi dapat berupa sinyal positif dan sinyal negatif.<sup>46</sup>

Dalam perumusan teori signaling, Spence membahas tentang sinyal dan apa yang disampaikan sinyal tersebut dalam pasar kerja dihubungkan dengan indikator ekonomi sebagai model dari fungsi signaling. Penelitian spence mengenai potensi manajer yang kekurangan informasi tentang kualitas dari investor. Investor yang memperoleh sinyal mengenai kualitas perusahaan tersebut akan mengurangi asimetri informasi. Hal ini diduga merupakan sinyal yang dapat diandalkan oleh investor, karena investor berkualitas rendah tidak mampu bersaing dengan investor yang pintar.<sup>47</sup>

Selain itu, terdapat juga bukti empiris bahwa jika ada kenaikan deviden, sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya penurunan deviden pada umumnya menyebabkan penurunan harga saham persahaan. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa para investor lebih menyukai deviden daripada capital gain. Namun MM bahwa suatu kenaikan deviden biasanya merupakan suatu sinyal

---

<sup>46</sup> Fenti Fauziah, *Kesehatan Bank, Kebijakan Deviden, dan Nilai Perusahaan (Teori dan Kajian Empiris)*, (Samarinda : RV Pustaka Horizon, 2017), h. 11-12

<sup>47</sup> *Loc.cit*

kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa mendatang. Sebaliknya suatu penurunan deviden atau kenaikan deviden yang dibawah kenaikan normal (biasanya) diyakini investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan menghadapi masa sulit di waktu mendatang.<sup>48</sup>

Manajemen perusahaan yang didasari motivasi signaling yang berkaitan dengan pembagian deviden merupakan harapan bahwa kinerja perusahaan dapat memberikan sinyal positif terhadap suatu investasi. Sinyal ini akan membawa investor untuk melakukan investasi melalui pembelian saham perusahaan. Semakin banyak investor melakukan investasi pada perusahaan, akan mendorong terjadinya peningkatan volume transaksi perdagangan saham perusahaan tersebut. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan harga pasar saham perusahaan atau peningkatan nilai perusahaan.<sup>49</sup>

Begitu pula dalam perbankan dengan adanya laporan keuangan yang di publikasikan oleh pihak bank para investor dan para kreditor dapat mengetahui seberapa berkembangnya kinerja dari perbankan tersebut sehingga dapat menjadi acuan para investor untuk menginvestasikan dana nya di dalam perbankan tersebut. Sehingga semakin banyak investor yang menginvestasikan dana nya ke perbankan tersebut akan mempermudah dalam hal pembiayaan yang

---

<sup>48</sup> *Loc.cit*

<sup>49</sup> *Loc.cit*

akan dilakukan oleh pihak bank, sehingga bank tersebut akan mengalami perkembangan.

## 2. Islamicity Financial Performance Indeks

*Islamicity Financial Performance Indeks* merupakan pengukuran kinerja keuangan bank syariah yang tidak hanya mengukur dalam hal keuangannya saja akan tetapi nilai-nilai kesyariahan yang ada di dalam bank syariah. Hal ini didasari oleh kinerja keuangan dalam islam yang tidak hanya diukur dalam finansialnya saja.<sup>50</sup>

Hameed et. al, menegaskan pengukuran kinerja dalam bank syariah berbeda. Pengukuran dengan metode dalam penelitian ini terdiri dari *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors – employees welfare ratio*, *islamic income vs non islamic income*, *islamic investmen vs non islamic invesment*, dan *AAOFI Index*. Penerapan indikator tersebut dapat tidak hanya menampilkan *performance financing* saja tetapi juga mengungkapkan nilai – nilai sosial bank syariah tersebut.<sup>51</sup>

### a. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

*Profit Sharing Ratio* merupakan rasio yang mengungkapkan seberapa besar pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*. Pengertian *Mudharabah* secara mu'amalah

---

<sup>50</sup> Shahul Hameed *et.al*, *Op. Cit.*h. 7.

<sup>51</sup> *Ibid*, h.30

berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan / diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>52</sup> *Musyarakah* asal kata dari *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut fiqih, *musyarakah* berarti akad antara orang – orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>53</sup> Berikut ini adalah rumus dalam mencari *profit sharing ratio* :

$$PRS = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

**b. Zakat Performance Ratio (ZPR)**

*Zakat Performance Ratio* adalah rasio yang mengukur seberapa besar zakat yang dikeluarkan oleh bank yang dibandingkan dengan aktiva bersih yang dimiliki bank tersebut. Aktiva bersih adalah nilai bersih (total asset yang dikurangi dengan total kewajiban) untuk mencerminkan kinerja keuangan bank syariah. Jika nilai yang dihasilkan kecil, berarti zakat atau amal yang dikeluarkan juga kecil bila dibandingkan dengan total asset bersih yang dimiliki.<sup>54</sup> Berikut adalah rumus dalam mencari *Zakat Performance Ratio* :

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

---

<sup>52</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Edisi Kedua)*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016, h. 79

<sup>53</sup> Ibid., h. 89

<sup>54</sup> Ayu Widiastuti, Mulyaning Wulan, *op.cit.*, h. 98

**c. *Equitable Distribution Ratio (EDR)***

*Equitable Distribution Ratio* Merupakan rasio yang mengukur seberapa besar presentase pendapatan yang akan didistribusikan kepada pihak *stakeholder* yang diliat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk qard dan sumbangan, biaya karyawan dan lain – lain. Untuk setiap hal tersebut, dapat dihitung dengan menilai jumlah pendistribusian (dengan sosial masyarakat , karyawan investor dan perusahaan) dibagi dengan total pendapatan yang dimiliki kemudian dikurangi dengan zakat dan pajak.<sup>55</sup> Berikut ini adalah rumus menghitung *Equitable Distribution Ratio* :

$$EDR = \frac{\text{dana kebajikan} + \text{beban tenaga kerja} + \text{dividen} + \text{laba bersih}}{\text{total pendapatan} - (\text{zakat} + \text{pajak})}$$

**d. *Islamic income vs non islamic income (IsIR)***

Merupakan rasio yang membandingkan total pendapatan yang diperoleh bank secara keseluruhan (halal dan non halal). Dimana nilai yang dihasilkan juga ukuran dari aspek halal dan sukses pelaksanaan prinsip – prinsip bank syariah bebas dari unsur – unsur riba.<sup>56</sup> Berikut adalah rumus dalam menghitung rasio *Islamic income vs non islamic income*:

$$IsIR = \frac{\text{Islamic Income}}{\text{Islamic Income} + \text{Non Islamic Income}}$$

---

<sup>55</sup> Ibid., h. 98

<sup>56</sup> Ibid., h. 99



**e. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment***

Rasio ini mengukur sejauh mana bank syariah melakukan suatu transaksi yang halal dibandingkan dengan transaksi yang mengandung *riba*, *gharar* dan judi.<sup>57</sup>

**f. *Directors – Employees welfare ratio***

Merupakan rasio yang membandingkan antara gaji direktur dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatihan, dan lain – lain.<sup>58</sup>

**g. *AAOIFI Indeks***

Indeks ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh lembaga – lembaga keuangan syariah telah memnuhi prinsip – prinsip yang telah ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution*).

Dari ketujuh rasio *Islamic Indeks*, tidak semuanya dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan suatu bank. Oleh karena itu peneliti hanya menggunakan 4 rasio yaitu, *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Equitable Distribution Ratio* (EDR), dan *Islamic income vs non islamic income* (IsIR).

---

<sup>57</sup> Sayekti Endah Retno Meilani, *op.cit.*, h. 188

<sup>58</sup> Nur hapipah, *Analisis Kinerja euangan Bank Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Indeks Maqasid Syariah dan Islamicity Performace Index*, ( skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lmpung, 2019) h. 31

## C. Kinerja Bank Syariah dan Pengukurannya

### 1. Definisi kinerja

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih tegas amstron dan barcon mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan konstribusi ekonomi. Lebih jauh indra bastian mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksana suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi.<sup>59</sup>

Kinerja keuangan adalah Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Untuk mengetahui hasil kinerja keuangan perusahaan, dapat diukur dengan rasio keuangan, salah satunya adalah rasio profitabilitas. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Asetss* (ROA).

---

<sup>59</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi*, (Bandung : Alfabeta ), 2011, h.2

*Return On Asetss* (ROA) adalah alat ukur yang baik dalam menghitung tingkat pengembalian modal bagi pemegang saham.<sup>60</sup>

ROA dihitung dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan.<sup>61</sup>

#### **D. Bank Syariah**

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al – Qur'an dan hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariat islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah islam; (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan – ketentuan Al – Qur'an dan Hadis. Sementara bank yang operasional berdasarkan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam operasiannya

---

<sup>60</sup> A. J. Keown, Martin & D, F. S. 2008, *MANAJEMEN Keuangan : Prinsip dan Penerapan Edisi 10*, Indonesia : PT Indeks

<sup>61</sup> Dwi Suwiknyo, 2016, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 150

itu mengikuti ketentuan – ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam.<sup>62</sup>

Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain :<sup>63</sup>

- a. Memindahkan uang
- b. Meminta dan membayarkan kembali dalam bentuk rekening koran
- c. Mendiskontokan surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya.
- d. Membeli dan menjual surat – surat berharga
- e. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
- f. Memberi jaminan bank

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

**Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Melakukan investasi yang halal	Tidak membedakan antara investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
<i>Profit dan falah</i> (kemakmuran dunia dan kebahagiaan di akhirat) <i>oriented</i>	<i>Profit oriented</i>

---

<sup>62</sup> Karme Perwataatmadja Dan M. Syafe'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta ; PT Dana Bakhti Wakaf) ,1997, h.1

<sup>63</sup> Muhamad, *Lembaga Keuangan Unit Kontemporer*, (Yogyakarta : UII Press,2000), h.63

<sup>64</sup> Antonio, M.S, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press),2011

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur – kreditur
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah

Dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, Bank Syariah di Indonesia dibagi menjadi 3 Jenis :

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
- c. BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara

dengan bank pengkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.<sup>65</sup>

Untuk menjaga agar bank syariah berjalan sesuai koridor syariah, wewenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa – fatwa hukum Islam tentang ekonomi dan keuangan, dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam pengawasan pelaksanaan fatwa DSN di lapangan oleh bank syariah, dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>66</sup>

#### E. Penelitian terdahulu

**Tabel 2.3 penelitian terdahulu**

NO	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Meila Kurniawati (2019)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuanagan Perbankan Syariah	Jenis penelitian Deskriptif kuantitatif menggunakan data panel dan metode Analisis <i>Fixed Effect Model</i>	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan
2	Nur Hisamuddin & M. Yayang Tirta K	Pengaruh <i>Good Governance</i> Bisnis	Penelitian kuantitatif menggunakan metode purposive	GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang

<sup>65</sup> Sayekti Endah Retno Meilani, *op.cit.*, h. 185

<sup>66</sup> *Loc.cit.*, h. 185

- |   |                           |  |  |   |
|---|---------------------------|--|--|---|
|   | (2011)                    | Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum  | sampling dan pengujian hipotesis menggunakan PLS   | diproksikan dengan ROA dan ROE.   |
| 3 | Karina Hapsari (2018)     | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan di Bank Umum Syariah Pada Tahun 2013 - 2015          | Penelitian Kuantitatif menggunakan metode purposive sampling dalam pengumpulan data dan model dengan menggunakan regresi linear berganda                               | <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan  |
| 4 | Anita Nur Khasanah (2016) | Pengaruh <i>Intelektual Capital dan islamicity Performance Index</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia | Penelitian kausal komparatif yang bersifat sebab akibat menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel dan menggunakan analisis regresi linear berganda | <i>Intelektual capital</i> dan PSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan ZPR,EDR, IsIR, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. |
| 5 | Siti Maisaroh (2015)      | Pengaruh <i>Intelektual Capial</i> Dan   | Variabel dependen dalam  | ZPR dan <i>Director-employees</i>   |

- |   |                               |   |   |  |
|---|-------------------------------|---|---|--|
|   |                               | <i>Islamicity Performance Index</i> terhadap profitabilitas perbankan syariah Indonesia   | penelitian ini adalah <i>intellectual capital</i> dan <i>Islamicity performance index</i> dengan formulasi perhitungan VAIC <sup>TM</sup> dan analisis data menggunakan regresi linear berganda | <i>welfare ratio</i> berpengaruh positif signifikan sedangkan <i>intelektual capital</i> , PSR, EDR, IsIR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>profitability</i> |
| 6 | Lisna Wahyu Pudyastuti (2018) | Pengaruh <i>Islamicity Performance Index</i> dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia | Penelitian kuantitatif, dengan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan analisis data menggunakan regresi linear berganda  | PSR dan FDR berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan EDR dan IsIR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan  |
| 7 | Rohyati (2017)                | Pengaruh <i>Islamicity performac index</i> terhadap kinerja pada bank umum syariah  | Penelitian kuantitatif, dengan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan analisis data menggunakan regresi linear berganda  | PSR berpengaruh negatif signifikan, IsIR berpengaruh positif signifikan, ZPR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA   |

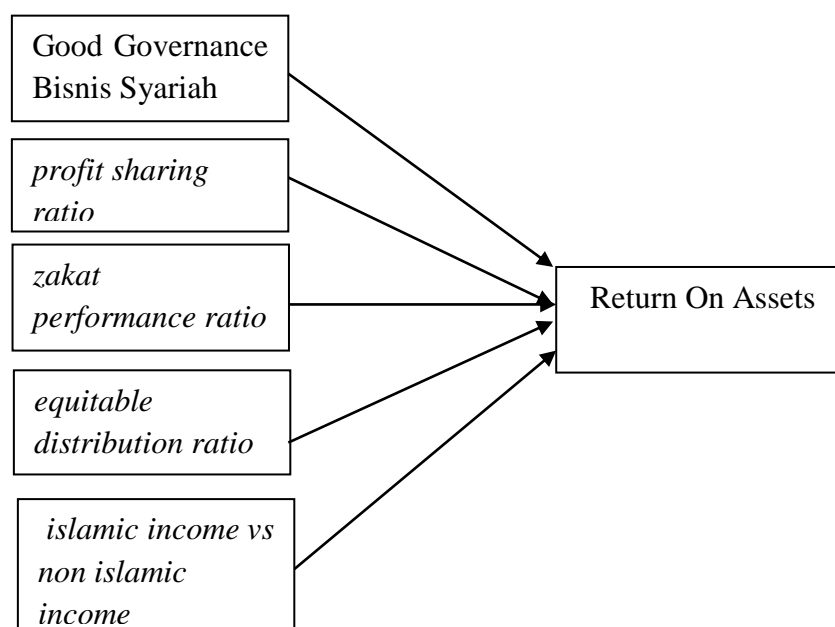


Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah di dalam penelitian ini peneliti menggabungkan antara *Good Governanace Bisnis Syariah* dengan *Islamicity Finanacial Performance indeks* untuk melihat ada pengaruh atau tidaknya terhadap kinerja keuangan di Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, Serta waktu penelitian yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

#### F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh Good Governance Bisnis Syariah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia menggunakan analisis data *Islamicity Performance Index* Periode 2014-2018, maka disusunlah kerangka berfikir yang sesuai dengan penelitian di atas melalui gambar beriku

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



Penelitian ini mencari bagaimana pengaruh dari Good Governance Bisnis Syariah dan Islamicity Performance Index terhadap kinerja keuangan syariah dimana dalam penelitian ini pengukuran kinerja keuangan syariah menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). Data yang digunakan merupakan data skunder yaitu laporan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2014-2015.

Islamicity Performance Index dalam penelitian ini hanya menggunakan empat rasio yaitu, *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio* dan *islamic income vs non islamic income*. Sedangkan pengukuran *Good Governance Bussines Syariah* diukur menggunakan analisi *self assessment* yang terdiri dari 11 indikator.

## G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah di jelaskan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Pengaruh *Good Governance Bisnis Syariah* (GGBS) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Penerapan GGBS diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah. Sebab penerapan GGBS dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan, sehingga mengurangi resiko tindakan kecurangan yang cenderung digunakan untuk mencari

keuntungan sendiri, mengurangi konflik kepentingan yang terjadi serta pelaporan bank umum syariah lebih transparan sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi. Penelitian yang dilakukan Meila Kurniawati (2019) dan Nur Hisamuddin & M. Yayang Tirta K (2011) serta Karina Hapsari (2018) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

**H<sub>1</sub> : *Good Governance Bisnis Syariah* (GGBS) Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum syariah.**

## **2. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah**

*Profit Sharing Ratio* menunjukkan besaran bagi hasil yang diperoleh oleh Bank Syariah. Pendapatan ini diperoleh dari akad *muharabah* dan *musyarakah*. Jumlah pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh bank dapat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam hal melakukan pembiayaan di bank syariah. Dengan demikian semakin banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan maka pendapatan di bank umum syariah juga bakalan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Anita Nur Khasanah (2016) dan Maisaroh (2015) yang menunjukkan *Profit Sharing Ratio* berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

**H<sub>2</sub> : *Profit Sharing Ratio* Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah**

**3. Pengaruh *Zakat Performance Ratio* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah**

*Zakat Performance Ratio* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar jumlah zakat yang dibayarkan dibandingkan dengan total aset bersihnya. Pembayaran zakat yang dilakukan oleh bank dapat menjadikan citra baik bagi bank syariah itu sendiri, sehingga masyarakat dapat tertarik untuk menginvestasikan atau melakukan pembiayaan di dalam bank syariah tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Maisaroh (2015) dengan hasil bahwa *zakat performance ratio* berpengaruh positif terhadap ROA. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan yaitu :

**H<sub>3</sub> : *Zakat Performance Ratio* Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah**

**4. Pengaruh *Equitable Distribution Ratio* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah**

*Equitable Distribution Ratio* Merupakan rasio yang mengukur seberapa besar presentase pendapatan yang akan didistribusikan kepada pihak pemegang kepentingan yang dilihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk qard dan sumbangan, biaya karyawan dan lain – lain. Untuk setiap hal tersebut, dapat dihitung dengan menilai jumlah pendistribusian (dengan sosial masyarakat , karyawan investor dan

perusahaan) dibagi dengan total pendapatan yang dimiliki kemudian dikurangi dengan zakat dan pajak. Semakin besar jumlah pendapatan yang dibagikan kepada pemegang kepentingan, mengindikasikan bahwa kinerja keuangan bank umum syariah mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Maisaroh (2015) dengan hasil bahwa *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh positif terhadap ROA. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan yaitu :

**H<sub>4</sub> : *Equitable Distribution Ratio* Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah**

#### **5. Pengaruh *Islamic Income vs Non-Islamic Income* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah**

*Islamic income vs non islamic income* Merupakan rasio yang membandingkan total pendapatan yang diperoleh bank secara keseluruhan (halal dan non halal). Dimana nilai yang dihasilkan juga ukuran dari aspek halal dan sukses pelaksanaan prinsip – prinsip bank syariah bebas dari unsur – unsur riba. Pendapatan halal seharusnya lebih tinggi dibandingkan pendapatan non halal. Hal ini disebabkan karena latar belakang dari bank yang berbasis syariah, maka sudah sepatutnya bank lebih selektif dalam memperoleh pendapatan. Pendapatan halal yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik hal ini sejalan dengan penelitian Maisaroh (2015) dan Rohayati (2017) dengan hasil bahwa *Islamic income vs non islamic income*

berpengaruh positif terhadap ROA. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan yaitu :

**H<sub>5</sub> : *Islamic Income vs Non-Islamic Income* Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah**

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. 2010. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*.  
Yogyakarta : Ar – Ruzz Media.

Adrianto dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (implementasi teori dan praktik)*, Pasuruan : Qiara Media Partner.

Ansofino, dkk.,. 2016. *Buku Ajar Ekonometrik*. Yogyakarta : Deepublish. 2016.

Antonio, M.S. 2011. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.

Anwar, Saiful. 2001. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Atmaja, Lukas setia.2008. *Teori Dan Praktek Manajemen Keuangan* . Yogyakarta : ANDI.

Dariri, Ahmad. 2005. *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapan dalam Konteks Indonesia*, Jakarta : Ray Indonesia, 2005.

Departemen pendidikan nasional, “Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa”,  
Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, h. 1045

Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi*, Bandung : Alfabeta.

Fauziah,Fenti.2017. *Kesehatan Bank, Kebijakan Deviden, dan Nilai Perusahaan (Teori dan Kajian Empiris)*. Samarinda : RV Pustaka Horizon.

Ghozali, I, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Edisi Delapan*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.

Keown, A. J. Martin & D, F. S. 2008, *MANAJEMEN Keuangan : Prinsip dan Penerapan Edisi 10*, Indonesia : PT Indeks

Kurniawan, Robert dan Budi Yuniarto. 2016. *Analisis Regresi Dasar Dan Penerapan Dengan R*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama. 2016.

Muhamad. 2000. *Lembaga Keuangan Unit Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press. 2000.

Muhamad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Edisi Kedua)*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Perwataatmadja, Karne Dan M. Syafe'i Antonio. 1997. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta ; PT Dana Bakhti Wakaf.

Purwanto. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

QS. An – Nahl (16) : 90

QS. Ar – Rahman (55) : 7-9.

Setiawan, Santy dkk., 2017. *Statistika II (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : CV. Andi Offset. 2017.

Sudarmayanti. 2007. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*. Bandung : CV. Mandar Maju, Bag.3, 2007.



- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta :Rajawali Pers, 2017, h. 167
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratma. 2015. *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015.
- Suwiknyo, Dwi 2016, *Analisis Laporan Keuanagn Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sunyoto, Danang *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Bandung : PT Refika Aditama Anggota Ikapi,2013.
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 19
- Yudiaatmaja, Firdayana. 2013. *Analisis Regresi dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik SPSS*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Farhah. 2014.*Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance di Bank Syariah Mandiri*. (skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2014 ).
- Hameed *et al.*2004. “*Alternative Discosure and Performance Measure for islamic bank*.”

Hapipah, Nur.2009. *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Indeks Maqasid Syariah dan Islamicity Performance Index*,( skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung, 2019).

Hardina et al., *Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Dengan Intellectual Capital Sebagai Variabel Moderating Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (The 9th University Research Colloquium 2019 Universitas Muhammadiyah Purworejo, 275-282)

Hariato, Nanda Dan Syafruddin, Muchamad.2013. “*Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Bisnis Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia*”. Diponegoro Jurnal Of Accounting. Volume 2 Nomor 4. Tahun 2013.

Harkaneri & Hana Refisa, “*Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Rumpun Ekonomi Islam Vol. 1 No. 2, 2018.

Islamic Financial Service Board.2009.”*Guiding Principles on Shari’ah Governance System for Institution Islamic Financial Service*”, Desember 2009

Jumansyah dan Syafei,2013, *Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Prananta Sosial, Vol. 2, No. 1

- Khairatu, Thomas S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*". (Surabaya : Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8 No.1 : 1-9,2006).
- Khusnawati, Shabatina.2017. *Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Dan Reputasi Perbankan Syariah Indonesia*, (Skripsi IAIN Surakarta tahun 2017).
- Makrifat, Jeli. 2019. *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas (studi pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2013-2017)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung, 2019).
- Meilani, Sayekti Endah Retno.2015. *Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah Di Indonesia*, seminar nasional the 2nd call for syariah paper.
- Permata, Bayu Aji.2012. "*Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode CAMELS dan Metode RGEC*". Jurnal Akuntansi UNESA vo. 1 No.1.
- Rahma , Yusro, *The Effect Of Intellectual Capital And Islamic Performace Index On Financing Performance*, (jurnal ilmu akuntansi vol 11(1),2018)
- Septiana, Devi. 2018. *Analisi Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan. Lampung. 2018).

- Sukardi, B.2013. *Corporate Governance Engineering of Islamic Banking and Finance : Tantangan Globalisasi Sistem Ekonomi dan Pasar Bebas*". Vol. 9 No. 1. April 2013. Jurnal Unida.
- Sulistyo, Prasetyo Adi. *et. al.*.2002. "Pengukuran Kesahatan Bank Syariah Berdasarkan Islamicity Performance Index Studi Pada BMI dan BSM".(Forum Riset Keuangan Syariah I).
- Utama,Andrew Shandy.2018. *Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika. Vol. 2. No. 2. September 2018.
- Wardani, Siti Maria. 2011. "Implementasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah". (Jurnal Universitas Jember. Walisongo. Vol. 19. No. 1. Mei 2011).
- Widiastuti, Ayu dan Mulyaning Wulan.2017. "Good Governance Bisnis Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah". jurnal ekonomi dan bisnis Vol.1. No.1. Maret 2017.
- Hastuti, Rahajeng Kusumo.2019. *5 Tahun Rerata Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah 15%*. CNBC Indonesia Syariah. 08 juni 2019. 18:37.
- Praditya, Ilyas Istianur.2019. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019 Mentok di 5,3 Persen*. Liputan6.com. 08 juli 2019. 20:15 WIB

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Uly, Johana Artha *LPS Beberkan Risiko yang Dapat Memperketat Likuiditas Perbankan*, Ekozone.com, 20 Januari 2020, 21:22 WIB.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (*Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tanggal 7 Desember tentang GCG bagi Bank Syariah*)

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) Rodmap Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2017-2019